

HEBUNGAN SIKKIM DENGAN INDIA

Sutomo ROESMADI

Persetujuan yang diberikan oleh Parlemen India pada tanggal 4 September 1974 terhadap Rencana Undang-undang Perubahan Konstitusi India untuk memasukkan Sikkim, sebuah negara kecil di pegunungan Himalaya, sebagai negara bagian India (associate State) memaksa kita untuk merenungkan kembali apa sebetulnya yang diinginkan India dari negara kecil seperti Sikkim tersebut.

Jika kita melihat geografi Sikkim dan India, maka tak dapat disangkal bahwa memang Sikkim mempunyai arti sangat penting bagi strategi pertahanan India. Sikkim terletak di antara Nepal di sebelah Barat, Tibet-RRC di sebelah Utara, Bhutan di sebelah Timur dan India serta Bangladesh di sebelah Selatan. Dengan demikian Sikkim merupakan sebuah negara yang berada jauh di daratan anak benua India, yang untuk jalan ke luar ke laut terbuka atau ke dunia luar mau tidak mau harus melalui wilayah India dan Bangladesh. Jika Sikkim dapat dikuasai oleh negara yang tidak bersahabat dengan India seperti RRC, maka berarti bahwa komunikasi India dengan wilayah India Timur (negara bagian Assam) atau dengan negara protektoratnya Bhutan akan terancam. Ancaman ini akan lebih berbahaya jika seandainya Bangladesh juga tidak bersahabat dengan India di kemudian hari, misalnya bersekutu dengan RRC.

Untuk mendalami peristiwa-peristiwa terakhir yang terjadi di Sikkim perlu kiranya diketahui latar belakang Sikkim secara umum sampai kepada perkembangan-perkembangan yang terjadi kemudian.

I

Sikkim meliputi wilayah seluas 2.818 mil persegi dengan perbatasan-perbatasan seperti yang diterangkan di atas. Tergantung dari wilayah India sebelah mana orang melihat peta bumi Sikkim; jika berada di wilayah India sebelah Barat atau

Bangladesh maka Sikkim terletak di Timur Laut atau Utara India. Jika berada di wilayah sebelah Timur (negara bagian Assam) maka Sikkim terletak di sebelah Barat Laut.

Sampai tahun 1973 penduduk Sikkim berjumlah kurang lebih 200.000 jiwa, yang terdiri dari beberapa golongan penduduk. Pertama, bangsa Lepcha yang merupakan penduduk asli Sikkim. Kedua, bangsa Bhutia yang memasuki Sikkim pada abad ke-17 dari Tibet. Ketiga, bangsa Nepal yang berimigrasi ke Sikkim pada abad ke-19 atas dorongan Inggris. Pada saat ini bangsa Nepal itu merupakan mayoritas, ialah 70% dari seluruh penduduk. Keempat, orang Tsong, sebuah suku bangsa asal Nepal. Kelima, pengungsi-pengungsi Tibet yang bermukim di Sikkim sejak tahun 1956.

Anggota keluarga raja atau penguasa yang memerintah Sikkim berasal dari bangsawan Bhutia yang menggantikan kepala bangsa Lepcha dalam abad ke-17. Raja keturunan Bhutia itu berhasil memasukkan agama Buddha Sekte Lama sebagai agama negara di Sikkim. Meskipun demikian sengketa-sengketa antara pengikut-pengikut bangsa Lepcha dan Bhutia terus berlangsung sampai abad ke-19. Pada dewasa ini kedua bangsa tersebut telah dapat hidup dengan rukun. Sikalau bangsa Lepcha dan Bhutia menganut agama Buddha, maka orang-orang Nepal memeluk agama Hindu.

Sebelum tahun 1817 Sikkim merupakan negara bahagian daripada Tibet, dan setelah tahun itu Inggris berhasil menempatkan Sikkim di bawah kekuasaannya. Pada tahun 1890 setelah diadakan perjanjian antara Inggris dan Cina, Sikkim diputuskan berada di bawah protektorat kerajaan India-Inggris, dan akan menerima petunjuk dan bimbingan Inggris dalam bidang hubungan luar negerinya. Keadaan ini terus berlangsung sampai saat India mencapai kemerdekaan dari Inggris di tahun 1947. Pemerintah India merdeka rupanya terus mewarisi tanggung jawab Inggris atas Sikkim tersebut pada tahun itu juga.

Dalam tahun 1949 terjadi pemberontakan terhadap raja Sikkim. India mengadakan intervensi langsung dengan mengirim tentaranya ke Sikkim dan kemudian mengambil alih pemerintahan Sikkim. Pada tahun 1950 India dan Sikkim menanda-tangani sebuah Treaty di mana India diserahi tanggung jawab dalam bidang-bidang pertahanan, hubungan luar negeri dan komunikasi Sikkim. Dapat dikemukakan di sini bahwa susunan Kementerian Luar Negeri India terdiri dari 10 Divisi yang dipimpin oleh seorang Joint Secretary atau Director, dan setiap divisi terdiri dari beberapa Seksi. Under-Secretary membawahi satu sampai empat Seksi

dan Deputy Secretary membawahi dua sampai enam Seksi. Deputy Secretary bagian Utara membawahi empat Seksi, yaitu: Nepal, Bantuan untuk Nepal, Sikkim dan Bhutan.

Setelah diadakan Treaty tersebut maka tentara India praktis ditempatkan di Sikkim secara permanen dan menduduki tempat strategis, karena Sikkim memang merupakan sebuah buffer state antara India dan Cina.

Akibat dari perkembangan-perkembangan politik yang terjadi di tahun 1959 dibentuk sebuah Dewan Negara yang terdiri dari 6 orang anggota yang ditunjuk oleh Raja, dan 10 orang anggota yang dipilih. Tujuh orang dari anggota yang dipilih disediakan untuk bangsa Bhutia dan Lepcha, dan tujuh untuk orang Nepal, sedangkan pendeta Buddha, suku-suku Tsong, dan suku terasing lainnya masing-masing mendapat sebuah kursi. Sisa sebuah kursi lainnya terbuka untuk umum. Setiap pemilih mempunyai 6 suara, sedangkan seorang calon yang berhasil menang biasanya mendapatkan suara dari masyarakat sukunya sendiri dan beberapa persentase dari masyarakat suku-suku lainnya. Kekuasaan Dewan Negara tersebut sangat terbatas, sedangkan rajalah yang memiliki kekuasaan penuh terhadap bidang-bidang keuangan, dalam negeri, urusan istana, dan hubungan dengan India. Raja mempunyai hak veto atas perundang-undangan yang harus disahkan oleh Dewan Negara.

Raja yang sekarang ialah Pelden Thondup Wangyal yang lebih suka memakai gelar raja-raja Tibet yaitu Chogyal daripada gelar Maharaja seperti India. Beliau menggantikan ayahnya, Maharaja Sir Tashi Wangyal pada tahun 1963. Raja (Chogyal) Thondup Wangyal semenjak naik tahta kerajaan selalu mendesak untuk mengadakan perubahan Treaty India-Sikkim tahun 1950 yang beliau anggap terlalu berat sebelah, karena lebih banyak menguntungkan India daripada Sikkim. Raja menginginkan agar negaranya dianggap sederajat oleh India sebagaimana halnya dengan negara tetangganya Bhutan, yang meskipun tetap ada hubungan dengan India di bidang hubungan luar negeri dan pertahanan, oleh India diberikan lebih banyak kebebasan dan malahan menjadi anggota PBB pada tahun 1971.

Sebagai langkah pertama untuk melaksanakan keinginannya itu, raja mengambil alih kedudukan Ketua Dewan Menteri, yang pada waktu-waktu sebelumnya selalu dipegang oleh seorang Pegawai Negeri Tinggi Pemerintah India yang ditunjuk oleh Pemerintah India dan diangkat oleh Raja. Namun keinginan raja

Sikkim untuk secara drastis menyingkirkan pengaruh India dari Sikkim tidaklah semudah yang direncanakan. Pengaruh India boleh dikatakan sudah menyeluruh dan berakar dengan kuat.

Pengaruh-pengaruh India sangat menyolok dalam bantuan ekonomi kepada Sikkim untuk merealisasikan Rencana-rencana Pembangunan Ekonominya dari tahun 1954-1971. Bantuan India tersebut adalah hasil perundingan-perundingan Maharaja Sir Tashi Wangyal dengan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru pada tahun 1952. Rencana Pembangunan pertama berjangka 7 tahun yaitu dari tahun 1954-1961. Bantuan India berupa grant langsung berjumlah Rupees 32,639 juta. Hasil nyata dari Rencana Pembangunan pertama itu ialah naiknya pendapatan per kapita rakyat Sikkim menjadi Rupees 700.--, berarti dua kali sebanyak pendapatan rakyat India sendiri.

Dalam Rencana Pembangunan kedua yang berjangka lima tahun (1961-1966) bantuan India kepada Sikkim berlipat ganda menjadi Rupees 63,637 juta. Titik berat pembangunan pertama terutama diletakkan pada pembangunan jalan-jalan dan jembatan-jembatan. Sedangkan dalam Pembangunan yang kedua masih tetap pada pembangunan jalan-jalan, ditambah dengan kesehatan, pendidikan, kesehatan dan tenaga listrik.

Rencana Pembangunan ke-3 (1966-1971) selain terus meningkatkan bidang-bidang tersebut juga dititik-beratkan kepada pertanian dan industri. Jumlah biaya pembangunan ketiga ini ialah sebesar Rupees 90,000 juta. Rencana Pembangunan keempat dimulai pada bulan April tahun 1971 dan akan berakhir pada tahun 1976. Dalam Rencana Pembangunan tersebut termasuk pembangunan proyek-proyek hidro-electric, industri, serta grant-grant khusus untuk bidang-bidang pertanian, pendidikan dan kesehatan.

Jikalau negara dalam keadaan bahaya, terutama waktu perang, maka mobilitas militer dan penduduk sangat penting, dan untuk ini diperlukan jaringan jalan yang baik. Pembangunan jalan-jalan raya utama di Sikkim rupanya oleh perencana-perencana India selalu dihubungkan dengan tempat-tempat strategis di wilayah perbatasan India sendiri. Misalnya antara Gangtok (Ibukota Sikkim) dengan Rangpo, kota perbatasan antara Benggala Barat India dan Sikkim, yang sebelum tahun 1954 hanya sepanjang 50 km yang dapat dilalui kendaraan bermotor. Dan untuk seluruh negara Sikkim hanya terdapat jalan sepanjang 342 km. Pada akhir Rencana Pembangunan III telah dibangun jalan sepanjang 1.000 km dan sejumlah 500 km jalan-jalan sambungan yang sebelumnya tidak

dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Jalan-jalan raya lainnya yang berhasil dibangun ialah Rishi di perbatasan Benggala Barat, Salepa di perbatasan Sikkim-Tibet, dan jalan antara Gangtok dan Hatu La Pass di perbatasan Sikkim-Tibet. Kemudian terdapat pula jaringan-jaringan jalan raya ke wilayah Sikkim Timur. Jelas bahwa jalan-jalan raya tersebut sangat penting dalam menghubungkan tempat-tempat utama yang mempunyai arti strategis dalam mempertahankan wilayah Sikkim, sebelum pihak musuh dapat menyerbu langsung ke wilayah India. Pembangunan lainnya dalam bidang jaringan lalu lintas ialah sebuah jembatan tambang yang menghubungkan Gangtok dan Tehgu sepanjang 50 km, yang sangat penting dalam menunjang mobilitas angkatan bersenjata India dalam mempertahankan Sikkim. Kemudian patut pula diperhatikan Jalan Raya Sikkim Utara (North Sikkim Highway) yang dibangun dengan bantuan India menghubungkan Gangtok dengan Lachen dan Lach, yang juga merupakan urat nadi utama dalam mempertahankan wilayah Sikkim yang berbatasan dengan Cina. Sampai tahun 1972 Departemen Perhubungan Sikkim memiliki sejumlah 181 kendaraan yang dapat beroperasi pada jalan-jalan sepanjang 1.170 km.

Dalam pembangunan jembatan-jembatan yang juga merupakan urat nadi dalam perhubungan dapat dicatat: a) jembatan suspensi berharga Rupees 500.000 yang selesai dibangun tahun 1965 menghubungkan Kalimpong di Benggala Barat dengan Sikkim Barat di kota Malli, b) jembatan sepanjang 292 kaki di atas sungai Teesta menghubungkan jalan raya Sikkim-Namgyal dengan jalan raya Siliguri (India). Sebanyak 19 buah jembatan lainnya telah dibangun di seluruh wilayah Sikkim. Meskipun Sikkim tidak memiliki pelabuhan udara dan jalan kereta api, orang-orang dari Gangtok dapat langsung menuju ke stasiun kereta api di Siliguri (India), atau pelabuhan udara Bagdogra dengan jalan darat.

Pembangunan komunikasi lainnya ialah kantor pos dan telegrap, yang sebelum tahun 1950 hanya berjumlah tiga buah. Sekarang terdapat 9 kantor besar dengan 30 buah cabangnya di seluruh kerajaan Sikkim. Pembangunan dalam bidang pendidikan yang patut diketahui antaranya: 38 buah sekolah dengan 2.500 pelajar di Sikkim sebelum Rencana Pembangunan, dan pada akhir rencana pembangunan ketiga terdapat 191 Sekolah Dasar, 13 Sekolah di atas SD tetapi di bawah SMP, 7 SMP dan 5 SIA, sebuah Sekolah Umum, sebuah Sekolah Latihan, dan sebuah Sekolah keagamaan Buddha di kerajaan Sikkim. Di samping itu terdapat

4 buah pendidikan orang dewasa. Jumlah pelajar di pelbagai bidang pendidikan ialah sebanyak 15.000 orang. Di berbagai universiti di India terdapat 387 mahasiswa Sikkim yang belajar atas bea siswa India. Sejak tahun 1958 pemerintah India juga memberikan bantuan sebanyak satu juta Rupees untuk pembangunan Lembaga Wangyal untuk Kajian Tibet (Wangyal Institute of Tibetology) di Gangtok.

Derikianlah hasil-hasil positif dari kerjasama Sikkim-India yang tertuang dalam Treaty India-Sikkim tahun 1950, kemudian direalisasikan melalui Rencana-rencana Pembangunan sedari 1954-1971, dan 1971-1976 yang kini sedang berjalan. Perhatikan angka-angka tersebut sepintas lalu, maka dapatlah kiranya digambarkan bagaimana mendalamnya pengaruh India. Dengan demikian domain, range dan scope of power India terhadap Sikkim sangat intensif, sehingga sukar kiranya bagi Sikkim untuk memilih dalam bidang-bidang atau ruang-ruang manakah Sikkim masih dapat bergerak dengan bebas.

Meskipun wilayah Sikkim seluas 2.313 mil persegi itu terisolir oleh negara-negara tetangganya dan jauh dari laut, Sikkim mempunyai beberapa kekayaan yang cukup berharga. Jika semua kekayaannya tersebut telah dapat dilola sepenuhnya, maka hal itu tidak hanya akan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat Sikkim, tetapi juga akan dapat mengurangi bantuan ekonomi dari India. Namun isolasi Sikkim oleh India sedemikian ketatnya sehingga seolah-olah India adalah sebagai pengusaha dan pembeli tunggal dari hasil-hasil kekayaan Sikkim itu. Sepertiga dari luas wilayah Sikkim terdiri dari hutan, sehingga dengan sendirinya kayu-kayuan merupakan barang berharga bagi Sikkim. Di samping itu terdapat tanaman-tanaman dan pohon-pohonan hutan seperti: fir (pohon deo), bambu, walnut, sal (sejenis pohon berharga di India), anggrek, dan tanaman-tanaman yang mengandung obat-obatan. Seluruh hasil kayu-kayuan Sikkim dijual ke India untuk pembuatan bantalan jalan kereta api. Departemen Kehutanan Sikkim sedang melaksanakan konservasi tanah dan reboisasi hutan. Sebuah kebun teh percobaan telah dibangun di Sikkim Barat pada tahun 1966.

Sikkim juga kaya dengan potensi hydro-electric. Pada bulan Mei 1965 sebuah proyek hydro-electric di Rongnichu telah dapat diselesaikan, yang mampu memberi aliran listrik sebanyak 2.100 kw ke wilayah Gangtok dan sekitarnya. Sebuah micro-hydro-electric project Sikkim yang pertama diresmikan di Panul pada bulan November 1969. Alirannya disalurkan ke Pangan, sebuah kota di

Sikkim Utara, dan desa-desa sekitarnya. Micro-hydro-electric project kedua dibangun untuk daerah Rongli dan Rohtol. Sebuah hydro-electric project lainnya dengan kapasitas 12.000 kw telah mulai dikerjakan di Legsip pada bulan April 1972.

Kerjasama India-Sikkim telah nampak pula dalam bidang-bidang kesehatan, di mana dokter-dokter tentara India juga ikut aktif membantu pelaksanaannya. Di bidang kegiatan lain antaranya perlu disebutkan: pembentukan Departemen Pertanian tahun 1955; Departemen Peternakan tahun 1954; Perusahaan Pertambangan Sikkim, sebuah joint-venture antara Pemerintah Sikkim dan India (1960), yang menggali barang-barang galian seperti tembaga, timah, dan seng dalam jumlah yang cukup besar. Hasil konsentrat timah tahunan dari tambang Bhotang ialah sebanyak 415,7 ton. Untuk menggalakkan kerajinan rakyat telah didirikan pula Lembaga Industri Kerajinan di Gangtok yang melatih orang-orang Sikkim. Pada tahun 1965 empat buah industri kerajinan rakyat dibangun di beberapa tempat di Sikkim dengan biaya sebesar Rupees 840,000 dari India. Indian National Council for Applied Economic Research telah melakukan feasibility studies untuk pembangunan industri kertas pulp di Sikkim.

II

Gejolak-gejolak politik yang terjadi pada tahun ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari peristiwa-peristiwa yang serupa pada tahun sebelumnya. Seperti telah diungkapkan terdahulu, setelah Raja Sikkim memegang kekuasaan, beliau selalu berusaha agar ikatan-ikatan dengan India berangsur-angsur dilonggarkan. Malahan kalau mungkin dilepaskan sama sekali. Namun setiap usaha Raja untuk melonggarkan ikatan Sikkim dengan India selalu mendapat reaksi negatif malahan kadang-kadang keras dari pihak India. Ada kalanya usaha-usaha tersebut dicap sebagai campur tangan asing dalam masalah-masalah dalam negeri Sikkim sendiri, yang pada hakikatnya adalah urusan India, meskipun pada tahun 1953 telah ditetapkan bahwa urusan dalam negeri dipegang oleh Raja sendiri dan urusan hubungan luar negeri oleh India. Kekhawatiran dan kecurigaan India terhadap adanya usaha-usaha asing untuk melepaskan Sikkim dari pengaruh India sedemikian rupa, sehingga India terpaksa mengadakan pembatasan perjalanan orang-orang asing ke wilayah Sikkim, terutama ditujukan kepada wisatawan-wisatawan Amerika. Hanya setelah mendapat

izin khusus dari Kementerian Luar Negeri India, wisatawan asing dapat mengunjungi Sikkim. Namun demikian, tidak sedikit wisatawan asing yang melanggar ketentuan ini, terutama warga negara Amerika Serikat, yang biasanya berakhir di dalam tahanan India.

Raja sendiri sangat maklum akan hal ini, tetapi keinginan untuk lepas dari pengaruh India tetap ada, terutama setelah Bhutan, negara tetangganya sebelah Timur, berhasil menjadi anggota penuh PBB pada tahun 1971, meskipun dalam bidang hubungan luar negeri dan pertahanan tetap dipegang India. Raja Sikkim sangat berhati-hati dalam sikapnya terhadap India, misalnya seperti yang diucapkan pada bulan Juni 1972, bahwa hubungan Sikkim yang utama dengan dunia luar hanyalah dengan India. Masih menjadi pertanyaan apakah pernyataan Raja Polden Thondup Wangyal dari Sikkim itu karena pengaruh ucapan Raja Bhutan terhadap India, yang antaranya mengatakan bahwa tidak ada perlunya bagi Bhutan untuk merubah/merevisi Treaty India-Bhutan tahun 1950. Sementara itu Raja Sikkim secara diam-diam telah menghipunkan kekuatan politik dalam negeri untuk dapat memegang kekuasaan lebih besar dan mantap melalui jalan konstitusional yaitu melalui pemilihan umum. Pengambil-alihan jabatan Ketua Dewan Menteri dari pejabat senior India pada tahun 1972 merupakan langkah pertama dalam usaha menuju cita-cita Raja Sikkim.

Pemilihan umum untuk Dewan Negara yang dimulai pada tanggal 10 Januari 1973, telah berakhir dengan kemenangan Partai Nasional Sikkim, yang dapat dukungan dari pihak Raja. Insiden politik terjadi ketika penghitungan suara dimulai pada tanggal 29 Januari, di mana dua partai oposisi, yaitu Partai Kongres Nasional Sikkim dan Partai Kongres Janata Sikkim menuduh Ketua Pemilihan mensabot jalannya pemilihan. Keadaan semakin memburuk ketika Ketua Partai Kongres Janata K.C. Pradhan ditahan pada tanggal 27 Maret dengan tuduhan menghasut koharmonisan rasial di Sikkim. Pada waktu Raja akan membuka Sidang Dewan Negara pada tanggal 20 Maret, partai-partai oposisi memboikotnya dan terjadi demonstrasi yang kemudian langsung menuju ke istana raja. Perundingan-perundingan dengan kaum oposisi dilakukan, di mana mereka menuntut dibebaskannya K.C. Pradhan, reformasi sistem pemilihan berdasar satu pemilih/orang satu suara. Tetapi perundingan tersebut tidak membawa hasil yang positif. Insiden-insiden selanjutnya terjadi di seluruh wilayah Sikkim antara pihak oposisi dan pengikut-pengikut raja, bahkan putra mahkota sendiri dituduh telah terlibat dalam penembakan terhadap

demonstran yang melukai tiga orang demonstran. Sementara itu kaum pengungsi Tibet juga dipersenjatai oleh pihak pro-raja dan menyerbu demonstran. Kantor Perwakilan Politik India, R.S. Bajpai kebanjiran orang-orang yang berlindung, termasuk Kazi Londup Dorgi, Presiden Partai Kongres Nasional. Pemerintah-pemerintah daerah di seluruh Sikkim praktis tidak berfungsi. Malahupun kantornya masih utuh biasanya kosong atau diambil alih oleh anak buah partai-partai Kongres Nasional dan Kongres Janata.

Mengingat suasana yang semakin panas inilah maka baik Raja maupun pemimpin-pemimpin oposisi sama-sama meminta jasa-jasa baik Kementerian Luar Negeri India untuk melarai persengketaan tersebut. Atas dasar permintaan kedua belah pihak yang bersengketa maka pada tanggal 6 April tentara India memasuki Sikkim dan mengambil alih tiga buah pos polisi yang sebelumnya diserbu oleh perusuk-perusuk anti-raja. Perundingan-perundingan yang diadakan antara Pemerintah dan Joint Council of Action yang dibentuk oleh Kongres Nasional dan Kongres Janata terhenti pada tanggal 6 April, dan sebanyak 20.000 pengikut kedua partai oposisi mulai mengadakan demonstrasi lagi menuju ke Bangkok. Tetapi keadaan mereda setelah tentara India menguasai keadaan, kecuali di daerah-daerah luar ibukota yang tidak didatangi tentara India.

Sebagaimana halnya yang terjadi pada pemberontakan tahun 1949, maka untuk kedua kalinya India mengambil alih administrasi pemerintahan Sikkim atas permintaan Raja sendiri. Pemerintah India menunjuk B.S. Das (anggota Dewan Balakota Delhi-Delhi Municipal Corporation yang juga sebelumnya wakil India untuk Dhutan) yang kemudian diangkat oleh Raja sebagai Kepala Eksekutif (Pemerintahan) Sikkim. Pengangkatan tersebut telah mempunyai efek baik bagi para partai oposisi dan mereka memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk menghentikan agitasi-agitasinya.

Pada tanggal 11 April Sekretaris Kementerian Luar Negeri India, Kewal Singh tiba di Bangkok dan mulai mengadakan perundingan-perundingan dengan Raja dan pemimpin-pemimpin oposisi. Melalui Joint Council of Action pemimpin-pemimpin oposisi mengajukan 14 macam tuntutan untuk reformasi pemerintahan Sikkim, antaranya:

- 1) demokratisasi pemerintahan
- 2) pemilihan berdasarkan satu orang satu suara, dengan perlindungan serbestinya terhadap kaum minoritas

- 3) badan peradilan yang bebas
- 4) penyelidikan terhadap adanya tuduhan penyalah-gunaan dana bantuan India dan penyalah-gunaan wewenang polisi
- 5) pengusiran pengungsi-pengungsi Tibet yang terlibat dalam kerusuhan-kerusuhan

Keempatbelas tuntutan tersebut merupakan suatu rancangan konstitusi sementara Sikkim yang akhirnya disetujui oleh raja. Pada tanggal 6 Mei 1972 Raja membubuhi tanda tangan pada rancangan tersebut bersama-sama dengan tanda tangan dari Dewal Singh, dari Kemlu India, dan ketiga pemimpin partai politik Sikkim. Rancangan konstitusi sementara Sikkim itu dalam garis besarnya memuat hal-hal seperti berikut:

- 1) Pemilihan hanya oleh pemilih-pemilih yang telah dewasa berdasarkan prinsip: satu orang satu suara.
- 2) Pemilihan untuk Dewan Perwakilan diadakan setiap 4 tahun sekali di bawah pengawasan wakil Panitia Pemilihan India (Indian Election Commission) yang untuk maksud tersebut diangkat oleh Pemerintah Sikkim.
- 3) Dewan Perwakilan mempunyai kekuasaan untuk mengajukan perundang-undangan dan menerima resolusi-resolusi mengenai pendidikan, kesehatan masyarakat, bea-cukai, pers, pengangkutan, pasar, kehutanan, pekerjaan umum, pertanian, suplai bahan makanan, rencana sosial ekonomi, perumahan dan gedung-gedung, serta pajak tanah. Masalah-masalah seperti kedudukan raja dan anggota keluarganya, perkara-perkara yang belum diajukan ke pengadilan, pengangkatan kepala pemerintahan, anggota-anggota kehakiman, hubungan dengan Pemerintah India mungkin tidak akan dibicarakan di dalam Dewan.
- 4) Dewan Eksekutif akan terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan yang dipilih dan diangkat oleh Raja atas saran atau nasihat Kepala Pemerintahan (Eksekutif). Kepala Eksekutif akan mengetuai sidang-sidang.
- 5) Sistem pemilihan akan diatur sedemikian rupa sehingga berbagai anggota masyarakat akan mempunyai wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan secara semestinya. Jumlah dan komposisinya Dewan Perwakilan dan Dewan Eksekutif akan diatur dan disesuaikan setiap saat, sehingga tidak ada satu anggota masyarakat/penduduk yang memperoleh kekuasaan dominan, dan hak serta kepentingan setiap anggota masyarakat terlindung.
- 6) Raja akan melakukan tugasnya sesuai dengan syarat-syarat yang dicantumkan di dalam persetujuan.

- 7) Kepala Pemerintahan akan diangkat oleh Raja setelah ditunjuk oleh Pemerintah India.
- 8) Hal-hal yang bersangkutan dengan anggota Dewan Eksekutif, maka Kepala Eksekutif akan bertindak setelah mengadakan konsultasi dengan anggota-anggotanya. Ia (Kepala Eksekutif) akan mengajukan semua hal yang penting ke hadapan Raja untuk mendapatkan persetujuannya, kecuali jika keadaan memaksa untuk bertindak dengan segera, di mana ia harus mendapat persetujuan Raja secepat mungkin. Kepala Eksekutif mempunyai tanggung jawab khusus untuk menjamin pelaksanaan konstitusi dan administrasi negara. Jalannya administrasi negara yang efisien, jaminan hak-hak dasar warga negara, kebebasan semua warga negara, penggunaan dana-dana pembangunan ekonomi dan sosial untuk kepentingan rakyat. Jika seandainya terjadi hal-hal menyangkut harmoni kerjasama antara berbagai-bagai anggota masyarakat, pelaksanaan pemerintahan demokrasi dan administrasi pemerintahan yang efisien, perbedaan paham antara Kepala Eksekutif dan Raja, maka masalah-masalah tersebut akan diajukan kepada Pemerintah India untuk mendapat pertimbangan-pertimbangannya.
- 9) Jaminan hak semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Peradilan adalah bebas.
- 10) Gedung-gedung istana dan pengawal istana Sikkim tetap di bawah kekuasaan Raja.
- 11) Pemerintah India bertanggung jawab sepenuhnya atas pertahanan, ketuhanan wilayah, hubungan luar negeri baik politik maupun ekonomi dan keuangan Sikkim. Pemerintah India akan melakukan tugas tersebut untuk kepentingan rakyat Sikkim dan keharmonisan masyarakat serta pembangunan administrasi serta sosial-ekonominya.

Demikianlah persetujuan-persetujuan yang dicapai dan berhasil dituangkan ke dalam Konstitusi sementara Sikkim yang telah ditanda-tangani oleh Raja, Wakil Pemerintah India dan ketiga pemimpin partai politik Sikkim. Patut diketahui pula bahwa pada tanggal 18 April partai-partai Kongres Nasional dan Kongres Janata sepakat untuk menggabungkan dan melebur partainya masing-masing, dan dalam pemilihan berikutnya mereka hanya akan ke luar dengan nama satu partai baru ialah Partai Kongres Sikkim¹.

¹Sebagai Presiden Partai Kongres Sikkim terpilih Kazi Londhup Dorgi.

III

Keadaan di Sikkim setelah dicapai persetujuan dasar Konstitusi sementara itu boleh dikatakan normal kembali sampai menjelang diadakan pemilihan umum baru pada bulan April 1974. Partai Kongres Sikkim berusaha keras dalam kampanyenya menjelang pemilihan umum tersebut agar mereka dapat memenangkan, sehingga dengan demikian rancangan Konstitusi itu segera dapat menjadi konstitusi permanen yang dapat secara kongkrit mencerminkan kehendak mereka. Tujuan mereka utama ialah pengurangan kekuasaan Raja seminimum mungkin, dan mengadakan kerjasama dengan India lebih erat lagi. Tidaklah dapat dipungkiri bahwa sebagai partai yang mewakili golongan mayoritas di Sikkim, mereka ingin agar merekalah yang menguasai pemerintahan, dan bukan Raja yang berasal dari suku Bhutia yang hanya mewakili golongan minoritas rakyat Sikkim. Pemilihan berikutnya diadakan pada bulan April 1974 dengan menggunakan sistem satu orang satu suara, yang jelas akan lebih banyak menguntungkan Partai Kongres Sikkim yang penganut-penganutnya sebagian besar terdiri dari orang-orang Sikkim keturunan Nepal, yang merupakan 70% lebih dari rakyat Sikkim. Pemilihan tersebut dimenangkan oleh Partai Kongres Sikkim dengan memperoleh sebanyak 31 kursi dari sejumlah 32 kursi yang diperebutkan. Partai Nasional Sikkim yang pro-Raja hanya memenangkan satu kursi, dengan demikian merupakan oposisi tunggal di Dewan Perwakilan¹.

Peranan India-pun sangat penting, tidak saja dalam usahanya melarai pihak-pihak yang bersengketa di Sikkim², tetapi juga dalam ikut campur secara langsung menformulir rencana Konstitusi Sikkim yang baru. Hasilnya seperti nampak kemudian akan lebih menguntungkan Partai Kongres Sikkim daripada golongan yang pro-Raja. Dalam hubungan pembuatan rancangan konstitusi inilah Raja Sikkim Pelden Thondup Wangyal berusaha mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah India di New Delhi, yang semula dimaksudkan untuk mencari jalan tengah. Pemerintah India kemudian menunjuk B.R. Rajagopaul, bekas Sekretaris Kementerian Kehakiman untuk membuat rancangan konstitusi Sikkim yang baru. Rancangan tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan

¹ Biasanya Ketua Partai yang menang juga dicalonkan menjadi Ketua Dewan Menteri.

² Selain hubungan luar negeri, pertahanan dan komunikasi, India juga dapat turut campur tangan langsung dalam masalah keamanan dan tertib hukum dalam negeri Sikkim, menurut interpretasi Treaty India-Sikkim tahun 1950.

Sikkim pada tanggal 11 Mei 1974 dalam bentuk Rencana Undang-undang. Rencana Undang-undang tersebut pada dasarnya hampir senada dengan persetujuan konstitusi sementara bulan Mei 1973 yang membatasi kekuasaan Raja, serta mempererat kerjasama antara Sikkim dan India. Pokok-pokok terpenting dari RUU tersebut ialah:

- 1) Menyerah-terimakan semua kekuasaan kepada Kepala Eksekutif yang dikepalai oleh orang India.
- 2) Membentuk Dewan Menteri yang bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan.
- 3) Mengurangi kekuasaan Raja dan hanya merupakan Kepala Negara tituler/lambang yang dibatasi oleh Konstitusi.
- 4) Untuk mempercepat pembangunan sosial, ekonomi dan politik Sikkim, akan diminta pada Pemerintah India untuk memasukkan Rencana Pembangunan Sikkim ke dalam Badan Perencana India (Indian Planning Commission).
- 5) Jika diminta, India akan memberikan fasilitas-fasilitas kepada mahasiswa-mahasiswa Sikkim untuk belajar di lembaga-lembaga pendidikan tinggi di India.
- 6) Pemerintah India akan memberikan kesempatan kepada warga negara Sikkim untuk menjadi pegawai negeri India.
- 7) Pemerintah Sikkim mungkin akan "meminta partisipasi" dan perwakilan rakyat Sikkim dalam lembaga-lembaga politik India.

Jika dilihat struktur administrasi konstitusi baru tersebut maka terdapat tiga jalinan tingkatan, yaitu Raja yang merupakan kepala negara yang dibatasi oleh konstitusi, sedangkan kekuasaan administrasi dibagi dua lagi. Pertama Dewan Menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan dan Kepala Eksekutif yang ditunjuk oleh Pemerintah India dan kemudian diangkat oleh Raja. Yang menjadi keberatan terutama Raja ialah pokok nomor 7, di mana Pemerintah Sikkim meminta partisipasi dalam lembaga politik India, yaitu Parlemen. Menurut Raja pasal tersebut (dalam pasal aslinya ialah pasal 30c) akan menuju proses penyatuan Sikkim ke dalam negara India, dan dengan demikian identitas Sikkim sebagai negara akan hilang sama sekali. Raja menginginkan agar Sikkim tetap memelihara identitas sebagai negara yang terpisah dari India, yang sebetulnya sesuai dengan Treaty India-Sikkim tahun 1950. Jelas dari pokok RUU Konstitusi Sikkim tersebut melampaui persetujuan tanggal 8 Mei 1973. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Raja menolak dicantumkannya Sikkim dalam Konstitusi India, dan ia mencoba mengundur waktu untuk juga menolak persetujuan atas RUU tersebut. Pada

tanggal 15 Juni beliau menulis surat kepada PM Indira Gandhi yang mengatakan bahwa diperlukan waktu 10 hari untuk mempelajari Rencana Konstitusi tersebut. Pada tanggal 20 Juni ketika beliau akan menyampaikan amanatnya di muka sidang Dewan Perwakilan mengenai RUU Konstitusi tersebut sekelompok demonstran mencoba menghalang-halangi anggota-anggota Dewan Perwakilan untuk memasuki gedung. Partai Kongres Sikkim dan Pemerintah India menuduh bahwa para demonstran itu adalah orang-orang yang pro-Raja terdiri dari pengawal-pengawal istana, pegawai-pegawai istana serta keluarga raja. Raja menyangkal, dan mengatakan bahwa demonstran itu adalah spontan dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat termasuk pegawai negeri yang tidak setuju dengan RUU Konstitusi. Insiden antara para demonstran dan Polisi Sadangan Pusat India tidak dapat dihindarkan lagi, di mana menurut keterangan Raja polisi India itu memukul demonstran dan menyemprotkan gas air mata.

Meskipun demikian sidang Dewan Perwakilan akhirnya diadakan pada hari itu juga (20 Juni) yang dihadiri oleh 26 dari seluruh anggota yang berjumlah 32 orang. Semua anggota yang hadir secara aklamasi memberi persetujuannya atas RUU Konstitusi tersebut. Kemudian ditelorkan beberapa resolusi tambahan oleh Dewan Perwakilan yang antara lain berbunyi seperti berikut:

- 1) Bahwa Badan Perencana India (Indian Planning Commission) memasukkan Rencana Pembangunan Sikkim ke dalamnya serta mengikut-sertakan pejabat Sikkim ke dalam Badan itu.
- 2) Bahwa seorang Menteri Sikkim yang bersangkutan dengan pembangunan Sikkim atau deputy-nya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembicaraan-pembicaraan dengan Dewan Pembangunan Nasional India (Indian National Development Council) atau badan-badan yang setaraf yang berhubungan dengan pembangunan Sikkim.
- 3) Bahwa Pemerintah India memberikan fasilitas-fasilitas khusus bagi mahasiswa-mahasiswa Sikkim.
- 4) Bahwa warga negara Sikkim yang memenuhi syarat dapat menjadi pegawai negeri India.
- 5) Bahwa rakyat Sikkim diberikan hak-hak dasar yang dijamin oleh Konstitusi India.
- 6) Bahwa Konstitusi India tersebut memuat bab-bab untuk amandemen.

Ketidak-puasan dari pihak Raja atas isi dan semangat dari Konstitusi baru itu telah mengakibatkan timbulnya demonstrasi-demonstrasi lagi antara pengikut-pengikut Raja dan anggota

partai Kongres Sikkim pada tanggal 21 Juni di Gangtok, dan keesokan harinya di luar ibukota. Reaksi negatif dari pihak Raja mungkin telah diharapkan oleh pihak partai Kongres Sikkim dan merupakan kesempatan baik bagi pemimpinnya untuk melancarkan aksi anti-Raja. Di hadapan masa demonstran yang berjumlah 10.000 orang, Kazi Londup Dongi, Presiden Partai Kongres mengajukan resolusi yang sangat radikal yang antara lain berbunyi seperti berikut:

"Raja tidak pantas dan bukan orang yang sepatutnya untuk tetap memangku tugasnya sekalipun sebagai kepala negara konstitusional". Diserukannya agar, "Raja bekerja sama dengan kekuatan politik yang ada sesuai dengan persetujuan tanggal 3 Mei 1973 atau mengundurkan diri dari arena politik untuk selama-lamanya".

Kemarahan pihak Partai Kongres rupanya disebabkan pernyataan-pernyataan pers ke dalam dan ke luar negeri yang diucapkan oleh Raja terhadap ketidak-sepakatannya akan konstitusi baru itu yang mau tidak mau akan menjuruskan Sikkim menjadi negara bagian India. Statemen-statemen Raja itu dianggap oleh Partai Kongres, tidak saja mengecilkan arti kemenangan mutlak partai Kongres sebagai partai yang berkuasa di Sikkim, tetapi juga disebut sebagai menyasarkan pendapat umum rakyat Sikkim, India dan dunia. Yang paling fanatik anti-Raja dan pro-India dari kalangan partai Kongres Sikkim ialah Seksi Kepemudaannya (Sikkim Youth Congress) yang juga menduduki 9 buah kursi di Dewan Perwakilan.

Dalam pada itu Raja terus mengadakan konsultasi dengan Pemerintah India di New Delhi. Kesempatan absennya Raja dari Gangtok telah dipergunakan oleh Partai Kongres untuk sekali lagi mengadakan sidang Dewan Perwakilan dan untuk kedua kalinya memberikan persetujuan penuh atas konstitusi baru pada tanggal 28 Juni. Selama di New Delhi Raja mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Menlu Swaran Singh, Sekretaris Menlu Kowal Singh pada tanggal 26 dan 27 Juni. Swaran Singh menasihatkan Raja agar ia dapat menyesuaikan dan mengakomodasikan dirinya dengan iklim politik baru di negaranya, serta menerima konstitusi baru yang telah mendapat dukungan wakil-wakil rakyat yang terpilih. Demikian juga pertemuan dengan Pt. Indira Gandhi, Raja telah diberi nasihat yang kurang lebih senapas dengan Menlu Swaran Singh, yaitu agar beliau mengikuti aspirasi-aspirasi rakyat Sikkim. Ditambahkan oleh Indira Gandhi, bahwa meskipun Raja hanya menjadi kepala negara tituler saja, masih

banyak peranan yang dapat dilakukan oleh beliau. Sementara itu Pemimpin partai Kongres, Kazi Londup Dorgi rupanya merasa jengkel atas tindakan Raja tersebut, sehingga ia perlu mengirim kawat yang satu ditujukan kepada Raja sendiri dan yang satu kepada Pemerintah India. Yang ditujukan kepada Raja berupa ultimatum agar Raja segera kembali ke Gangtok. Kawat yang ditujukan kepada Indira Gandhi dan Swaran Singh berisi peringatan agar pemimpin-pemimpin India jangan menghiraukan permintaan-permintaan Raja Sikkim tersebut. Seksi Kepemudaan dari Partai Kongres mengirim pesan pula kepada Indira Gandhi dengan diakhiri dua slogan yang sangat pro-India: "Long live India and its democratic principles" dan "Long live Indo-Sikkimese Unity".

Sekembalinya ke Gangtok Raja sebetulnya ingin mengadakan sidang Dewan Perwakilan untuk mengutarakan pendapatnya mengenai Konstitusi tersebut. Tetapi rupanya Partai Kongres yang menguasai Dewan Perwakilan menentangnya, kecuali jika Raja menyetujui konstitusi baru terlebih dahulu. Akhirnya Raja mengalah dan pada tanggal 4 Juli Raja membubuhkan tanda tangannya pada Konstitusi Sikkim yang baru tersebut disaksikan oleh Kewal Singh, sebagai wakil Pemerintah India, K.S. Bajpai Kepala Perwakilan Politik India di Sikkim, B.S. Das Kepala Eksekutif Sikkim dan seluruh anggota Dewan Perwakilan. Kazi Londup Dorgi atas nama para anggota Dewan Perwakilan mengucapkan terima kasihnya atas kesediaan Raja, dan mengharapkan bahwa dengan diundangkannya Konstitusi baru itu akan berakhirlah ketegangan dan konfrontasi antara berbagai pihak dan kesalah pahaman di dalam masyarakat Sikkim.

Sebagai Partai yang menang mutlak dalam pemilihan umum, maka Kazi Londup Dorgi, Ketua Partai Kongres Sikkim menjadi calon utama untuk memangku Ketua Dewan Menteri Sikkim. Sebelum peresmian jabatannya itu, rupanya Dorgi perlu mendapat nasihat-nasihat khusus dari India dan konsultasi-konsultasi lainnya, sehingga ia datang berkunjung ke New Delhi disertai 32 orang anggota Dewan Perwakilan Sikkim. Dalam keterangannya di New Delhi kunjungan "goodwill" tersebut juga dimaksudkan untuk menyatakan terima kasihnya kepada India yang telah "menyelamatkan demokrasi" Sikkim. Dalam pertemuan-pertemuan dengan pemimpin-pemimpin India antara lain PM Indira Gandhi, para anggota Dewan Perwakilan Sikkim mendapat jaminan PM Indira Gandhi bahwa identitas Sikkim sebagai negara akan tetap ada. Tetapi anggota-anggota Dewan Perwakilan Sikkim sendiri tidak memberi keterangan apapun mengenai jaminan identitas negara Sikkim tersebut.

IV

Sebagai negara yang mempunyai perbatasan darat yang luas dengan berbagai macam negara, terutama di bagian Utara, maka kepentingan India untuk menanamkan pengaruhnya di negara-negara pegunungan Himalaya tersebut sangat penting artinya. Negara-negara yang terletak di pegunungan Himalaya merupakan buffer-states terutama antara India dan Cina. Dalam masa damai mungkin pentingnya negara-negara perbatasan tersebut tidaklah begitu besar. Tetapi di masa perang atau sengketa, maka kedudukan buffer states akan sangat terasa untuk membendung sebuhan musuh yang berupa kekuatan pisik, atau mengurangi arus infiltrasi musuh agar tidak secara langsung memasuki wilayah India.

Pada periode tahun limapuluhan di mana RRC dan India masih bersahabat baik, kedua belah pihak mengakui daerah pengaruhnya masing-masing. India mengakui kedaulatan penuh RRC atas Tibet, dan sebaliknya RRC mengakui pengaruh India atas Nepal, Sikkim dan Bhutan. Namun setelah persengketaan RRC-India meningkat menjelang tahun enam puluhan, Republik Rakyat Cina berusaha agar negara-negara pegunungan Himalaya tersebut lepas dari pengaruh India. Meskipun tidak diharapkan akan sepenuhnya pro-Peking, tetapi setidaknya-tidaknya mereka bebas dari genggaman India. Demikian juga India berusaha sekeras-kerasnya agar pengaruh Peking tidak sampai tertanam di negara-negara tersebut. Setelah Tibet dikuasai mutlak oleh Cina, maka negara-negara Himalaya seperti Nepal, Sikkim dan Bhutan bertambah meningkat arti strateginya bagi India. Intervensi India sedemikian rupa sehingga secara langsung atau tidak langsung ikut menggulingkan pemerintahan feodal Nepal di tahun 1950 dan digantikan oleh Raja yang lebih pro India. Tetapi RRC pun tidak tinggal diam, dan permulaan tahun enam puluhan Nepal sudah agak lepas dari pengaruh India, yang mengakibatkan berakhirnya samasekali Perwakilan Politik serta penempatan pos-pos militer Nepal oleh tentara India. Hubungan Nepal dan India kemudian dilaksanakan melalui hubungan diplomatik biasa.

Bagi negara-negara pegunungan Himalaya lainnya tidaklah semudah itu pengaruh India dapat disingkirkan. Bhutan dan Sikkim adalah merupakan negara mini jika dibandingkan dengan Nepal yang besarnya berlipat ganda dari wilayah Bhutan dan Sikkim. Dengan demikian sangat sukar bagi kedua negara Sikkim dan Bhutan, walaupun mereka ada keinginan untuk melonggarkan ikatan dengan India. Hanya Bhutanlah yang lebih berhasil untuk melepaskan ikatannya dengan India, dimana negara tersebut menjadi anggota PBB pada tahun 1971. Setelah Nepal dan Bhutan lepas ikatannya dengan India, maka tinggal Sikkimlah yang masih dapat dipegang oleh India. Rupanya India sangat khawatir, kalau seandainya Sikkim berhasil melepaskan ikatannya dengan India, maka

wilayah India Selatan (Benggal Barat dan Assam) akan terancam keamanannya. Dalam hubungan inilah rentetan-rentetan kejadian di Sikkim harus ditinjau.

Bagi orang yang bukan awam sangat sukar kiranya untuk menerima begitu saja ucapan dan alasan Menteri Luar Negeri India Swaran Singh, bahwa asosiasi negara Sikkim ke dalam negara India adalah kehendak murni wakil-wakil rakyat Sikkim sendiri, seperti diungkapkan dalam resolusi Dewan Perwakilan Sikkim pada tanggal 20 Juni 1974. Bagi India tentunya hal ini merupakan suatu keputusan politik yang penting, suatu peluang emas yang sukar dicarinya kemudian. Sebaliknya, jika seandainya Sikkim dapat dimasukkan ke dalam bahagian negara India sebagai associate State, maka akan sukarlah bagi Sikkim untuk keluar kembali. Sebagaimana pula tingkah laku negara-negara besar di dunia, maka alasan hubungan "saudara tua dan saudara muda" akan selalu dikemukakan oleh India dalam hubungannya dengan Sikkim.

Andaikata Parlemen India secara aklamasi atau dengan suara majoritas dapat menerima saran pemerintah India untuk memasukkan Sikkim ke dalam Konstitusi India sebagai negara asosiasi, maka hal ini akan mempunyai akibat pengaruh yang lebih luas terhadap politik internasional, dan terutama dalam hubungan negara-negara besar dengan negara-negara kecil. Dalih bahwa wakil-wakil rakyat Sikkim sendiri yang meminta negaranya dijadikan negara asosiasi dengan India akan merupakan preseden yang buruk, yang dikhawatirkan akan ditiru oleh negara-negara lainnya di dunia. Ingatan kita masih segar, bahwa serbuan tentara India ke Pakistan Timur misalnya, berdasarkan alasan bahwa Pemerintah Bangla Desh sendiri meminta kehadiran tentara India di sana. Hal ini akan pula meningkatkan campur tangan yang lebih meluas dari negara-negara besar di anak benua India, misalnya RRC dan Uni Soviet.

Tindakan atau tingkah laku India selama tiga tahun terakhir ini, terutama campur tangan dalam perang Bangla Desh, peledakan bom nuklir bawah tanah, serta memasukkan Sikkim sebagai negara asosiasi India telah banyak mengejutkan dunia pada umumnya, dan negara-negara tetangga pada khususnya. Sebagai negara tetangga yang paling dekat dengan India, jika dihitung jarak dari kepulauan Andaman dan Nikobar milik India dengan Sumatera sejauh kurang lebih 100 mil laut, maka Indonesia patut kiranya memperhatikan dengan seksama dan memberikan perhitungan yang lebih tepat terhadap tingkah laku India dalam politik internasional, baik dalam jangka dekat maupun dalam jangka jauh.